

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada saat ini Negara Kesatuan Republik Indonesia sedang berusaha untuk memajukan pertumbuhan ekonomi di setiap provinsi yang ada di Indonesia dengan tujuan untuk mensejahterakan semua lapisan penduduk yang berada di masing-masing provinsi dengan melakukan pemerataan pembangunan. Dengan dilakukan pemerataan pembangunan ini diharapkan dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Indonesia.

Pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional pada hakekatnya adalah upaya untuk meningkatkan kapasitas pemerintahan daerah sehingga tercipta suatu kemampuan yang handal dan profesional dalam menjalankan pemerintahan serta memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat (Saragih, 2003). Pembangunan daerah juga berarti memampukan daerah untuk mengelola sumber daya ekonominya secara maksimal guna untuk memajukan daerah dan kesejahteraan masyarakat.

Pembangunan daerah perlu ditingkatkan agar laju pertumbuhan antar daerah semakin seimbang sehingga pelaksanaan pembangunan nasional semakin merata di Indonesia. Untuk meratakan pembangunan nasional, pemerintah bersama-sama masyarakat bekerja sama untuk mewujudkannya. Diharapkan dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dapat tercapainya

pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Ketika terjadi pembangunan daerah maka dapat berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di suatu daerah tersebut. Menurut Sukirno (2010), pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang otonomi daerah yang telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, negara Indonesia menerapkan kebijakan otonomi daerah. Dengan adanya pembentukan otonomi daerah ini diharapkan dapat terwujudnya pembangunan daerah yang lebih baik sehingga dapat mempercepat proses pembangun daerah dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan undang-undang tersebut menyebabkan perubahan pada hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah di bidang administrasi pemerintahan dan keuangan, yang dikenal dengan sistem desentralisasi. Salah satu desentralisasi yang paling berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah adalah desentralisasi fiskal yang merupakan bagian penting dari implementasi otonomi daerah. Pertumbuhan ekonomi dapat memacu pemerintah daerah untuk memaksimalkan sumber daya yang dimiliki guna menciptakan pembangunan daerah yang maksimal yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut.

Dampak positif diberlakukannya desentralisasi fiskal pada pertumbuhan ekonomi, dapat dilihat dari perkembangan ekonomi di Indonesia. Berikut adalah data PDB di Indonesia dan persentase laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia tahun 2010-2017 yang ditunjukkan pada Tabel 1.1.

Tabel 1.1
Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2010-2017

Tahun	PDB (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan PDB (%)
2010	6.864	-
2011	7.288	6,17
2012	7.727	6,03
2013	8.156	5,56
2014	8.565	5,01
2015	8.983	4,88
2016	9.435	5,03
2017	9.913	5,07

Sumber : BPS, diolah

Tabel 1.1 menunjukkan bahwa PDB di Indonesia pada tahun 2010-2017 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya, dari 6.864 Triliun Rupiah pada tahun 2010 menjadi 9.913 Triliun Rupiah pada tahun 2017. Meski demikian, kenaikan PDB tersebut tidak dibarengi dengan peningkatan laju pertumbuhan PDB setiap tahunnya. Laju pertumbuhan PDB sempat mengalami penurunan berturut-turut pada tahun 2011-2015 dari 6,17 persen menjadi 4,88 persen. Meski pertumbuhan ekonomi pada tahun 2016 dan 2017 lebih tinggi dari tahun 2015, namun angka tersebut tetap lebih rendah dari tahun 2011. Hal ini menandakan bahwa perekonomian di Indonesia belum stabil. Pertumbuhan ekonomi mengalami penurunan mengakibatkan produk yang dihasilkan menjadi sedikit, ketika produk yang dihasilkan sedikit berdampak pada menurunnya tingkat

penyerapan tenaga kerja sehingga pendapatan masyarakat menurun dan kesejahteraan masyarakat juga akan menurun.

Pembangunan ekonomi daerah pada dasarnya merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari prinsip otonomi daerah. Tiap-tiap daerah mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan kepada masyarakat.

Dalam mewujudkan pembangunan daerah yang optimal, pemerintah bertanggungjawab dalam memberi arahan dan bimbingan kepada masyarakat serta selalu memantau kegiatan pembangunan daerah tersebut, sedangkan masyarakat sendiri sebagai pelaku utama dalam pembangunan daerah harus selalu berperan aktif dalam setiap kegiatan. Diharapkan dengan adanya kerjasama antar pemerintah dan masyarakat dapat tercapainya pembangunan ekonomi nasional yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah diterapkan suatu kebijakan yaitu desentralisasi fiskal. Dalam melaksanakan desentralisasi fiskal, prinsip *money should follow function* merupakan salah satu prinsip yang harus diperhatikan dan dilaksanakan (Saragih, 2003). Artinya, setiap penyerahan atau pelimpahan wewenang pemerintahan membawa konsekuensi pada anggaran yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan tersebut. Desentralisasi fiskal tidak mungkin dapat terlaksana apabila tidak diikuti pula dengan pemberian transfer dana oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Pemberian transfer dana dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah tersebut untuk menambah aset

tetap daerah, yang pada dasarnya transfer dana tersebut digunakan untuk membangun sarana dan prasarana daerah guna kelancaran pelaksanaan tugas pemerintah atau untuk fasilitas publik (Dewi dan I Dewa, 2017).

Haryanto (2013) menyebutkan bahwa peningkatan investasi di daerah akan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di daerah. Hal itu berdampak pada meningkatnya kesempatan kerja, sehingga akan mengurangi angka pengangguran. Oleh karena itu pada era desentralisasi fiskal ini diharapkan pemerintah dapat meningkatkan pelayanan publik secara maksimal sehingga proses produksi dapat berjalan dengan lancar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Desentralisasi fiskal diwujudkan dalam bentuk kebijakan dana perimbangan yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH) baik dari pajak maupun sumber daya alam, Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK). Oleh sebab itu, kebijakan desentralisasi fiskal berpengaruh langsung terhadap keuangan daerah, khususnya terhadap sumber pendapatan daerah (Saragih, 2003).

Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 disebutkan bahwa untuk pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah, pemerintah pusat akan mentransfer Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan bagian daerah dari Dana Bagi Hasil (DBH) yang terdiri dari pajak dan sumber daya alam. Tujuan transfer ini adalah untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar pemerintah dan menjamin tercapainya pelayanan publik yang maksimal terhadap masyarakat. Dalam hal ini

diharapkan bahwa di masa yang akan datang pemerintah daerah tidak lagi bergantung pada bantuan dari pemerintah pusat.

Dana perimbangan memiliki peran penting dalam meningkatkan infrastruktur yang dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Semakin besar transfer dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah berupa dan perimbangan maka semakin tinggi pula dampaknya terhadap perkembangan perekonomian di daerah tersebut. Dengan semakin tingginya tingkat investasi modal dari pemerintah pusat diharapkan mampu meningkatkan kualitas layanan publik dan pada akhirnya mampu meningkatkan partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah.

Dengan adanya transfer dana berupa Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) yang merupakan komponen inti dari kebijakan desentralisasi fiskal yang akan membiayai operasional pembangunan yang ada di suatu daerah. Dari pembiayaan tersebut akan memperoleh output yaitu pertumbuhan ekonomi. Realisasi transfer Dana DAU, DAK, dan DBH ditunjukkan pada Tabel 1.2, Tabel 1.3, dan Tabel 1.4.

Tabel 1.2
Realisasi Transfer Dana Alokasi Umum Tahun 2010-2017

Tahun	DAU (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan DAU (%)
2010	203,57	-
2011	225,53	10,79
2012	273,81	21,41
2013	311,14	13,63
2014	341,22	9,67
2015	352,89	3,42
2016	385,36	9,20
2017	398,58	3,43

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kemenkeu, diolah

Tabel 1.2 menunjukkan DAU yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami peningkatan dari sisi jumlah setiap tahunnya, yang awalnya dari 203,57 triliun Rupiah pada tahun 2010 menjadi 398,58 triliun Rupiah pada tahun 2017. Meski begitu, jika dilihat dari pertumbuhan DAU di Indonesia, pada tahun 2010-2017 laju pertumbuhan DAU cenderung menurun meski sempat berfluktuasi. Pertumbuhan DAU yang tidak stabil mengakibatkan tingkat investasi mengalami penurunan, ketika tingkat investasi turun mengakibatkan tingkat produksi juga akan mengalami penurunan, sehingga pertumbuhan DAU yang tidak stabil tidak dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi. Dengan meningkatnya DAU maka diharapkan provinsi-provinsi di Indonesia akan mampu membiayai pengeluaran kebutuhan daerah dan meningkatkan produktifitas sektor ekonomi yang lebih efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan PDRB di provinsi-provinsi di Indonesia.

Tabel 1.3
Realisasi Transfer Dana Alokasi Khusus Tahun 2010-2017

Tahun	DAK (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan DAK (%)
2010	20,96	-
2011	24,80	18,36
2012	25,94	4,59
2013	30,75	18,55
2014	31,89	3,71
2015	54,88	72,06
2016	163,87	198,59
2017	167,67	2,32

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kemenkeu, diolah

Berdasarkan Tabel 1.3, dapat diketahui bahwa komposisi DAK yang ditransfer oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah setiap tahunnya

mengalami peningkatan, yang awalnya pada tahun 2010 transfer DAK sebesar 20,96 triliun Rupiah menjadi 167,67 triliun Rupiah pada tahun 2017. Pada tahun 2016 komposisi DAK yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah mengalami peningkatan pesat, yang pada tahun 2015 transfer DAK sebesar 54,88 triliun Rupiah mengalami peningkatan menjadi sebesar 163,87 triliun Rupiah. Meningkat pesatnya transfer DAK pada tahun 2016 dikarenakan kebijakan pemerintah untuk memperkuat desentralisasi fiskal melalui pengalihan Belanja K/L ke daerah dengan meningkatkan alokasi transfer daerah yaitu DAK (Kemenkeu, 2017). Pertumbuhan transfer DAK di Indonesia pada kurun waktu 2010-2017 mengalami fluktuasi, yang pada awalnya sebesar 18,36 persen pada tahun 2011 mengalami penurunan pada tahun 2012 menjadi 4,59 persen, dan pada tahun 2013 meningkat kembali sebesar 13,96 persen sehingga menjadi 18,55 persen, dan pada tahun 2014 menurun kembali dengan cukup drastis menjadi 3,71 persen dan mengalami peningkatan pada tahun 2015 dan 2016 yang signifikan menjadi 72,06 persen pada tahun 2015 dan 198,59 persen pada tahun 2016 dan mengalami penurunan kembali pada tahun 2017 menjadi 2,32 persen. Pertumbuhan DAK yang tidak stabil tidak dapat menunjang proses produksi, karena ketika pertumbuhan DAK yang tidak stabil akan berdampak pada menurunnya tingkat investasi, ketika tingkat investasi turun maka kegiatan produksi juga akan mengalami penurunan.

Tabel 1.4
Realisasi Transfer Dana Bagi Hasil Tahun 2010-2017

Tahun	DBH (Triliun Rupiah)	Pertumbuhan DBH (%)
2010	92,18	-
2011	96,91	5,13
2012	111,54	15,09
2013	88,46	-20,69
2014	103,94	17,49
2015	78,05	-24,90
2016	90,53	15,99
2017	88,23	-2,54

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Pusat, Kemenkeu, diolah

Berdasarkan Tabel 1.4, dapat diketahui bahwa transfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah yang berupa Dana Bagi Hasil (DBH) pada tahun 2010-2017 mengalami ketidakstabilan. Hal ini dapat dilihat pada tahun 2010-2017 terdapat penurunan transfer DBH yang terjadi pada tahun 2013, 2015, dan tahun 2017. Transfer DBH pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 terus mengalami peningkatan, namun pada tahun 2013 mengalami penurunan yaitu yang awalnya pada tahun 2012 transfer DBH sebesar 111,54 triliun Rupiah menjadi hanya sebesar 88,46 triliun Rupiah pada tahun 2013, dan pada tahun 2014 mengalami peningkatan menjadi 103,94 Triliun Rupiah, mengalami penurunan kembali pada tahun 2015 menjadi 78,05 Triliun Rupiah, dan mengalami peningkatan kembali pada tahun 2016 menjadi 90,53 Triliun Rupiah, dan pada tahun 2017 mengalami penurunan kembali menjadi 88,23 Triliun Rupiah. Hal tersebut juga diikuti dengan laju pertumbuhan DBH yang juga mengalami fluktuasi setiap tahunnya. Pertumbuhan DBH yang tidak stabil tidak dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi, karena ketika pertumbuhan DBH yang tidak stabil akan mengakibatkan tingkat investasi menurun, ketika investasi mengalami penurunan maka kegiatan

produksi juga akan mengalami penurunan yang berdampak pada menurunnya penyerapan tenaga kerja dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena pendapatan masyarakat juga akan mengalami penurunan.

DBH yang diterima setiap daerah mengalami fluktuasi dikarenakan adanya perbedaan potensi daerah yang berbeda tiap daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa mekanisme bagi hasil berdasarkan Sumber Daya Alam (SDA) atau pusat bisnis yang dimiliki daerah. Daerah yang kaya sumber daya alam akan memperoleh bagi hasil pajak yang relatif besar. Menurut Pujiati (2008), pengoptimalan perolehan DBH yang dianggap sebagai modal bagi kepentingan pembangunan daerah akan mempercepat pertumbuhan PDRB.

Penelitian ini lebih memfokuskan pada dana perimbangan dari sisi penerimaan daripada sisi pengeluaran antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Dalam sisi penerimaan, dana perimbangan yang ditransfer pemerintah pusat digunakan oleh pemerintah daerah sebagai modal dalam aktivitas produksi yang dapat meningkatkan output di suatu daerah. Adanya peningkatan output dalam jangka panjang akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan PDB pada tingkat nasional dan kenaikan PDRB pada tingkat regional yang digunakan sebagai ukuran atas perkembangan suatu negara atau wilayah. Sementara itu, dari sisi pengeluaran, dana perimbangan digunakan untuk belanja daerah untuk pengadaan aset tetap berupa tanah, gedung, dan bangunan serta fasilitas umum yang bersumber dari belanja modal.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk meneliti lebih jauh lagi terkait dengan pengaruh dana perimbangan terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan masalah di mana ketika negara Indonesia menerapkan kebijakan desentralisasi fiskal, laju pertumbuhan ekonomi di Indonesia beberapa tahun terakhir mengalami penurunan. Hal ini dapat berdampak pada penurunan produk yang dihasilkan. Ketika produk yang dihasilkan sedikit, maka penyerapan tenaga kerja mengalami penurunan sehingga pendapatan masyarakat juga akan menurun dan tingkat kesejahteraan masyarakat juga akan menurun karena aktivitas ekonomi yang tidak lancar. Pertumbuhan transfer dana perimbangan (DAU, DAK, DBH) yang tidak stabil juga dapat mengakibatkan tingkat investasi mengalami penurunan yang akan berakibat pada menurunnya tingkat produksi, sehingga ketika transfer dana perimbangan tidak stabil maka tidak dapat menunjang proses pertumbuhan ekonomi.

Terkait hal tersebut maka pertanyaan penelitian yang dapat dikemukakan adalah bagaimana dampak dana perimbangan terhadap PDRB pada Provinsi di Indonesia tahun 2013-2017 melalui sumber penerimaan daerah yang digunakan dalam rangka pelaksanaan tugas desentralisasi yang berupa dana perimbangan yang terdiri dari DAU, DAK, dan DBH.

Berdasarkan uraian di atas, maka perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai dana perimbangan yang merupakan salah satu wujud dari desentralisasi

fiskal dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di provinsi-provinsi Indonesia, sehingga pertanyaan penelitian yang dapat dirumuskan adalah “Bagaimana pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dan Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB provinsi-provinsi di Indonesia?”

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini memiliki tujuan untuk:

1. Untuk memberikan gambaran mengenai pengaruh pelaksanaan desentralisasi fiskal terhadap PDRB pada provinsi di Indonesia tahun 2014-2017.
2. Untuk mengestimasi pengaruh komponen-komponen desentralisasi fiskal terhadap PDRB, yaitu :
 - a. Mengestimasi pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) terhadap PDRB tiap provinsi di Indonesia pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2014-2017.
 - b. Mengestimasi pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap PDRB tiap provinsi di Indonesia pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2014-2017.
 - c. Mengestimasi pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH) terhadap PDRB tiap provinsi di Indonesia pada saat pelaksanaan desentralisasi fiskal tahun 2014-2017.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dapat diambil dari hasil penelitian ini adalah:

1. Bagi Instansi Pemerintah

Sebagai bahan masukan agar pemerintah pusat khususnya pemerintah daerah lebih memperhatikan tentang kebijakan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal.

2. Bagi dunia akademis

Hasil penelitian dapat dipakai sebagai bahan referensi perbandingan terhadap objek penelitian yang sejenis, khususnya pengaruh desentralisasi fiskal terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

3. Bagi Penulis

Penulis dapat mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh dalam bentuk tulisan sekaligus mendapatkan pengetahuan mengenai hal yang diteliti.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini terbagi menjadi lima bab yang disusun sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metodologi penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini menjelaskan tentang beberapa teori-teori. Teori-teori tersebut mencakup Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil (DBH), dan pertumbuhan ekonomi. Pada bagian ini juga terdapat penelitian terdahulu yang menghasilkan kerangka pemikiran dan hipotesis penelitian.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan mengenai variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian serta definisi operasionalnya, jenis dan sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini hasil penelitian yang mencakup gambaran umum tentang obyek penelitian, serta hasil pengumpulan data yang berhubungan dengan masalah yang di bahas. Penulis juga melakukan analisis data untuk mencapai tujuan penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan, keterbatasan penelitian dan saran yang berupa masukan yang dapat diberikan untuk peneliti selanjutnya.